

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG

Alman Manongga¹
Sofia Pangemanan²
Josef Kairupan³

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Dalam pengamatan dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). bahwa telah banyak program yang di implementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelolah dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerinah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implentasi program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di kelurahan Pinokalan kota Bitung. Enelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapatkan bahwa implementasi Program Keluarga harapan dalam mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan di tinjau dari Komunikasi yang di lakukan oleh Pihak Pemerintah Kelurahan Pinokalan Cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga harapan, Kemiskinan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kota Bitung merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, namun dalam perkembangannya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian terutama dengan meluasnya kesempatan kerja terutama peluang bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Untuk itu pemerintah memiliki peranan penting dalam mengimplementasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada. Berikut adalah fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia antara lain yaitu: fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi lebih kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas disegala bidang kehidupan, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat,

dan fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Agar lebih dapat memantapkan dan mensukseskan program-program perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sangat perlu mengikutsertakan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah, khususnya pada pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dan menderita sangat diperlukan. Keberpihakan ini merupakan langkah strategis yang manusiawi sebagai wujud nyata dari kewajiban luhur untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah Kota Bitung untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program yang menjadi prioritas pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan dan melayani masyarakat setempat. Program-program yang digagas pemerintah Kota Bitung yaitu pembangunan dan pengembangan

infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah Kota Bitung sendiri telah memiliki program untuk masalah kemiskinan hal ini juga di tunjang dengan Program nasional yaitu PKH (Program keluarga harapan), akan tetapi kemiskinan tetap menjadi mimpi buruk dan terus memabayang-bayangi perkembangan Kota Bitung. Kemiskinan di antara pertumbuhan dan perkembangan kota potensial ini merupakan momok yang harus dipikirkan bagaimana penyelesaiannya, terutama dari tingkatan yang paling bawah yaitu di wilayah kelurahan Pinokalan kecamatan ranowulu yang menjadi Tempat Tinggal dari peneliti. Dalam pengamatan dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain yaitu: bahwa telah banyak program yang di implementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelolah dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di

masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.

Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis oleh karena suatu situasi yang ditandai dengan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diciptakan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:65), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokusperhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu diantaranya :

1. Teori Gorge C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan keada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang berlalu panjang akan cenderung

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:203) terdapat dua karakteristik utama yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi : SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapa internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseagamaan dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan dluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan apakah letak sebuah program suda tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dari teori George C. Edwards dan Marilee S. Grindle mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edwards untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model Edwards III, teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih muda dan jelas untuk digunakan dalam pembahasan penelitian ini.

Implementasi kebijakan ini merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberi arah agar sasaran atau tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan untuk memberi arah agar sasaran atau tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan para pembuat kebijakan. Keseluruhan proses penetapan kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar apabila telah direncanakan atau diprogramkan secara teratur. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku dalam administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Untuk itu demi mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut diperlukan juga kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 2005:2) kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu dalam suatu rencana.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Richard Rose (dalam Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Berdasarkan definisi ini Rose menegaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Carl J. Federich sebagaimana dikutip (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksana usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memilikimaksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara singkat Thomas R Dye (dalam Edi Suharto, 2010:44) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Sementara itu Anderson (dalam Edi Suharto, 2010:44) menyatakan secara lebih spesifik bahwa kebijakan publik sebagai sebuah jalan aksi yang sengaja diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menyelesaikan satu masalah atau sejumlah fokus permasalahan.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan menurut Djohani (dalam Anwas, 2013:49) buku yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global dimana pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan.

Begitu pula menurut Rappaport (dalam Anwas, 2013:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Secara lebih rinci Slamet (dalam Anwas, 2013:49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap

informasi, serta mampu bertindak inisiatif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus masalah penelitian ini berorientasi pada masalah penelitian, yaitu implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, dengan melihat empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan yang sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (widodo 2010) yaitu diantaranya :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya :

- Lurah Pinokalan
- Sekretaris Kelurahan
- Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
- Masyarakat Miskin (3 orang)

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai Implementasi program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di kelurahan Pinokalan Kota Bitung, dalam hal ini peneliti menggunakan teori sentral dari Edwards III yaitu diantaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Lurah, sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tentang Implementasi program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di kelurahan Pinokalan peneliti menemukan bahwa komunikasi yang di lakukan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Pinokalan dalam rangka Implementasi Program Keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pinokalan sudah cukup baik namun belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinokalan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Lurah, sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti

sumberdaya yang ada di Pemerintah Kelurahan Pinokalan sudah lah cukup sesuai, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing sumberdaya yang ada masih belum di jalankan secara maksimal.

3. Disposisi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Lurah, sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti dari pengamatan di lapangan bahwa kesungguhan dari dari aparat/dinas social secara keseluruhan cukuplah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pinokalan. Kendati demikian masalah harus di maksimalkan lagi.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Lurah, sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti struktur birokrasi yang adai di Dinas Sosialis cukup Baik dan berjalan sebagai mana mestinya walaupun di lapangan masih terjadi berbagai kekurangan.

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi Program Keluarga harapan dalam mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan di tinjau dari Komunikasi

yang di lakukan oleh Pihak Pemerintah Kelurahan Pinokalan Cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas.

2. Pengimplementasian Program Keluarga Harapan dalam konteks sumberdaya yang ada di Pemerintah Kelurahan Pinokalan sudah cukup Mumpuni dan jika di Maksimalkan tentunya pemerintah akan memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana tujuan dari Program yang ada, salah satunya Program Keluarga Harapan.
3. Disposisi, dalam hal ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan.
4. Struktur Birokrasi, masih terkendala dalam aspek fragmentasi dan regulasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan maupun pelaksana program ini.

Saran

1. Pemerintah Kelurahan Pinokalan dalam Hal ini Pemerintah Kelurahan Pinokalan sebagai perangkat Pemerintahan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan lebih meningkatkan kualitas komunikasi bahkan harus melancarkan komunikasi secara persuasive, terlebih khusus terhadap Masyarakat terdampak Program Keluarga Harapan demi mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan .
2. Sumberdaya yang di miliki oleh Pemerintah Kelurahan Pinokalan harus lebih di tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun Kualitas, sebagai contoh dalam perekrutan tenaga pendamping PKH haruslah merekrut orang yang benar-benar

paham akan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping Program Keluarga Harapan agar tujuan dari program tersebut boleh tersampaikan dengan baik dan boleh di kembangkan oleh masyarakat Miskin Kelurahan Pinokalan yang terdampak dari program yang di maksud.

3. Motifasi kerja yang di miliki oleh tenaga yang di miliki oleh Pemerintah Kelurahan Pinokalan Kecamatan rabnowulu, Kota Bitung harus lebih di tingkatkan Lagi.
4. Regulasi yang ada pada saat ini baik yang mengatur tentang Struktur birokrasi di Pemerintah Kelurahan Pinokalandalam hal pelaksanaan teknis program maupun regulasi pengurusan kelengkapan atau persyaratan yang di perlukan oleh masyarakat terdampak program harus di perbaiki lagi dan harus lebih berpihak pada masyarakat miskin tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin 2005. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : PT. Bumi Akasara.
- Abdul Wahab, Solichin 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Akasara.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Anwas, Oos. M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung : Alfabeta.

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat
2006. Pendataan Sosial Ekonomi.
Jakarta Pusat: Badan Pusat
Statistik.
- Badan Pusat Statistik, Garis
Kemiskinan Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2003-
2016. Kota Bitung.
- Edi Suharto. 2010. Analisis Kebijakan
Publik (paduan praktis mengkaji
masalah dan kebijakan sosial).
Bandung : Alfabeta.
- Hamid, Edy Suandi. 2008. Sistem
Ekonomi dan Pemberantasan
Kemiskinan. Jakarta. Lembaga
Penelitian SMERU Research
Institute.
- Khofifa.2016. Program Keluarga
Harapan, Tujuan dan
HarapanPembangunan. Jakarta
:Kementrian Sosialis RI.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung:
Remaja Karya.
- Poerwadaraminta. 2014. Kamus Besar
bahasa Indonesia. Yogyakarta
:Pustaka Abadi.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun
Masyarakat Memberdayakan
Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial dan Pekerjaan Sosial.
Bandung : Refika Aditama.
- Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. Analisis
Pengaruh PDRB, Pendidikan dan
Pengangguran Terhadap
Kemiskinan di Kabupaten / Kota
Jawa Tengah Tahun 2005-2008.
Skripsi. Semarang: Universitas Di
Ponerogo.
- Widya,S. 2012. Formulasi Peningkatan
Kapasitan Kelurahan. Bandung:
Expres Cipta Karya
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik:
Teori dan Proses. Yogyakarta:
Media Pressindo.
- Winarno Budi, 2012. Kebijakan Publik :
Teori, Prose, dan Studi Kasus.
Yogyakarta : Caps.
- Peraturan Daerah Kota Bitung No. 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bitung.
- Peraturan Walikota Bitung No. 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kota Bitung.
- Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009
tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang–Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.